

Analisis Determinasi Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia Makassar

Achmad Setiawan

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Syamsul Hadi

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Mukhlisa A. Ghaffar

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Erna

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Shidik Burhani

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Andi Ana Humaerah

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Herdy Pratama Putra

Politeknik Negeri Fakfak

Alamat: Jalan Poros Makassar - Parepare Km. 83, Mandalle, Pangkep, Kabupaten Pangkajene
Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90761

Korespondensi penulis: achmad.setiawan@polipangkep.ac.id

Abstract. *Determining the working and operational areas of a fishing port is very important because it strengthens the existence of a fishing port while supporting port operations. The purpose of this study is to determine the working and operational areas of the Untia fishing port based on the ratio of space utilization in land and water areas. The research method used is quantitative descriptive. Secondary data was obtained through literature surveys and institutional surveys to obtain port design plans and spatial planning plans, while primary data was obtained using satellite imagery and verified directly in the field to obtain geographical coordinates. Analysis was conducted on the position of the Untia port in relation to the provincial spatial planning plan, the physical condition, and the operational aspects of the port. The results obtained include the determination of geographical coordinates for the operational areas on land and water used for the construction and operation of main facilities, functional facilities, and supporting facilities for Untia fishing port. Based on the analysis results, the total operational area of the Untia Fisheries Port is determined to be 232.33 hectares, consisting of a land operational area of 9.8 hectares, a water operational area of 92.84 hectares, a land operational area of 23.56 hectares, and a water operational area of 106.13 hectares.*

Keywords: *fishing port, operating area, untia, working area, wkopp.*

Received Mei 30, 2025; Revised Juni 10, 2025; Accepted Juni 16, 2025

*Achmad Setiawan, achmad.setiawan@polipangkep.ac.id

LATAR BELAKANG

Pelabuhan perikanan (PP) di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua fungsi utama pelabuhan perikanan yaitu: sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan. Kegiatan bisnis perikanan yang dimaksud adalah sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan berperan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan dibidang usaha perikanan. Disamping itu, keberadaan pelabuhan perikanan juga dapat menjadi prasarana vital yang mendukung seluruh rantai nilai perikanan, mulai dari hulu hingga hilir, demi terciptanya efisiensi dan peningkatan daya saing produk perikanan.

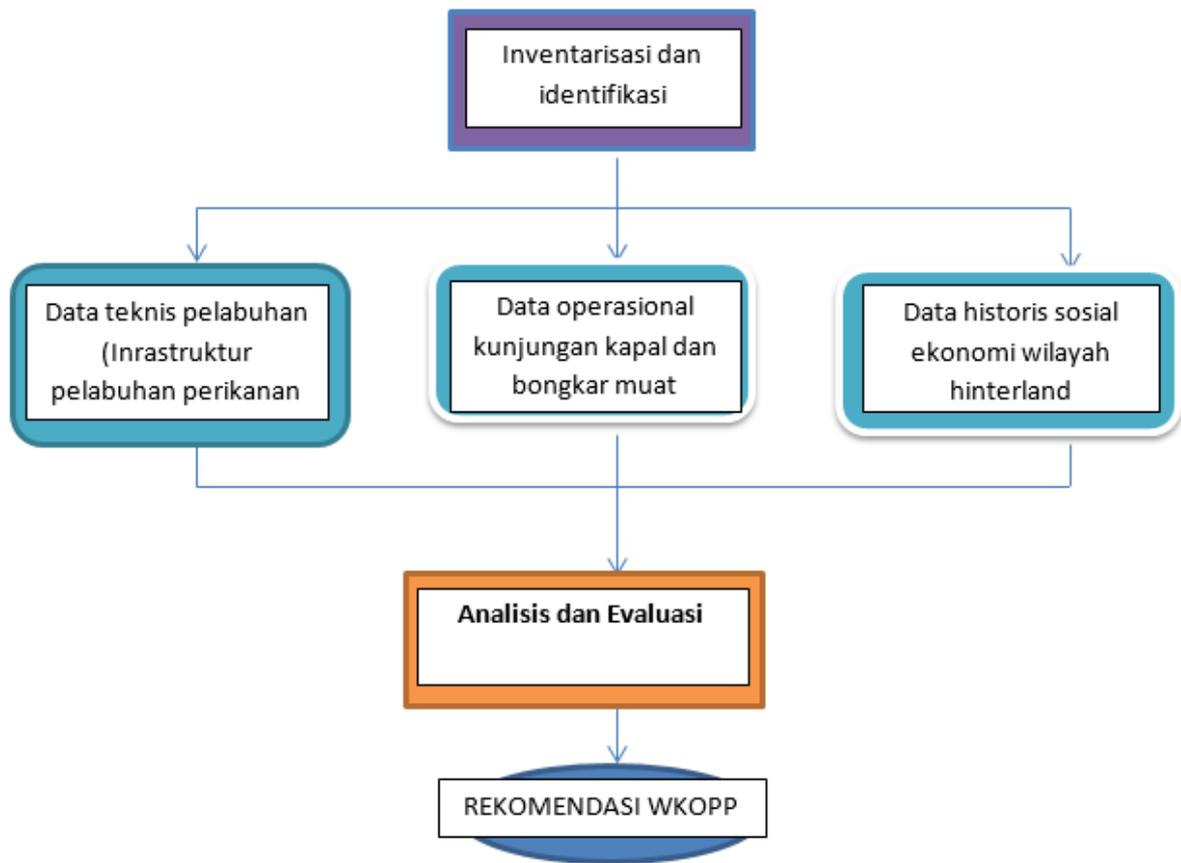
Dalam upaya memaksimalkan pengembangan industri perikanan terpadu, pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan diwilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan serta pelayanan kesyahbandarandi pelabuhan perikanan. Dalam rangka optimalisasi tersebut, penetapan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan perlu diidentifikasi untuk menetapkan koordinat dari wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan. Penjelasan wilayah kerja dan Pengoperasian pelabuhan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian dari daratan dan perairan, yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan. Sedangkan, pengertian wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan Untia merupakan salah satu pelabuhan yang berada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dan yang terbesar di Sulawesi Selatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pelabuhan perikanan Untia belum menetapkan wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhannya padahal hal ini sangat penting dalam mendukung operasional dan pelayanan pelabuhan secara optimal dalam hal penguatan ketersediaan bahan baku industri perikanan, pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, penegakan hukum, aplikasi teknologi informatika, pengembangan dermaga sesuai standar dan konsolidasi regulasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan “Analisis Determinasi Penentuan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia Makassar”, sehingga dapat didelineasi secara tegas titik koordinat wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Untia untuk mendukung operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan Untia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Analisis data dilakukan untuk menguraikan masalah yang didapatkan di lapangan dengan mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif. Secara umum, tahapan analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi : Analisis pencitraan, analisis ini dilakukan melalui pengamatan kondisi fisik eksisting di lapangan melalui drone untuk transformasi data spasial (keruangan) menggunakan sistem informasi geografis untuk mengetahui pengoperasian wilayah daratan berupa letak kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan pelabuhan perikanan, akses transportasi yang berhubungan dengan pelabuhan, letak permukiman masyarakat perikanan dan fasilitas sosial maupun fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan pelabuhan serta kondisi penggunaan lahan sekitar pelabuhan yang dimungkinkan untuk ditetapkan sebagai wilayah pengembangan pelabuhan serat pengoperasian bagian perairan merupakan alur pelayaran kapal perikanan menuju pelabuhan perikanan, untuk keperluan darurat, uji coba pelayaran kapal baru, penempatan kapal mati dan pengembangan pelabuhan jangka panjang dan analisis teknis dilakukan secara kuantitatif terhadap data-data teknis pelabuhan yang meliputi ukuran kapal perikanan (Gross Tonnage/GT), jumlah kapal yang melakukan tambat labuh dan frekuensi pendaratan kapal perikanan.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Perikanan Untia

Pelabuhan Perikanan (PP) Untia terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. PP Untia berdiri diatas lahan hasil reklamasi seluas 5,4 hektar akan mendukung aktivitas nelayan yang berada di zona wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713. Menurut data berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi sumber daya ikan yang dimiliki Sulawesi Selatan berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali. Sedangkan estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 713 yaitu sebesar 929.700 ton/tahun (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, 2022). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 (WPPNRI 713) adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Secara

administrasi, WPPNRI 713 ini bersinggungan dengan 9 (sembilan) wilayah provinsi, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. WPPNRI 713 memiliki cakupan wilayah administrasi yang sangat luas, luasnya mencapai 655.865,0 Ha, dimana kewenangan pengelolaan dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan. Wilayah penangkapan ikan di luar 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan wilayah yang diatas 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

1. Posisi Pelabuhan Untia Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana tata ruang merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian suatu pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2024, rencana pola ruang disekitar pelabuhan Untia ditetapkan sebagai kawasan permukiman, kawasan mangrove dan kawasan perikanan. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut pada rencana pola ruang di sekitar Pelabuhan Untia berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) merupakan zona Pelabuhan Perikanan dengan Kode Zona KPU-PL-46. Arahan pemanfaatan ruang pada zona tersebut diperbolehkan untuk: perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penelitian kegiatan konservasi, pendidikan kegiatan konservasi, survei dan/atau penelitian ilmiah, pelepasan jangkar, penggunaan galah untuk mendorong perahu, pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia, pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil, pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia, bongkar muat ikan, pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), penetapan tempat labuh, penetapan tempat alih muat antar kapal, pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pembangunan tempat perbaikan kapal, pembangunan TPI, pembangunan *breakwater* (pemecah gelombang), pembangunan turap (*revetment*), pembangunan groin, penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan dan pengoperasian jetty, usaha jasa penyewaan

Tabel .1 Statistik operasional pelabuhan perikanan Untia 5 Tahun Terakhir

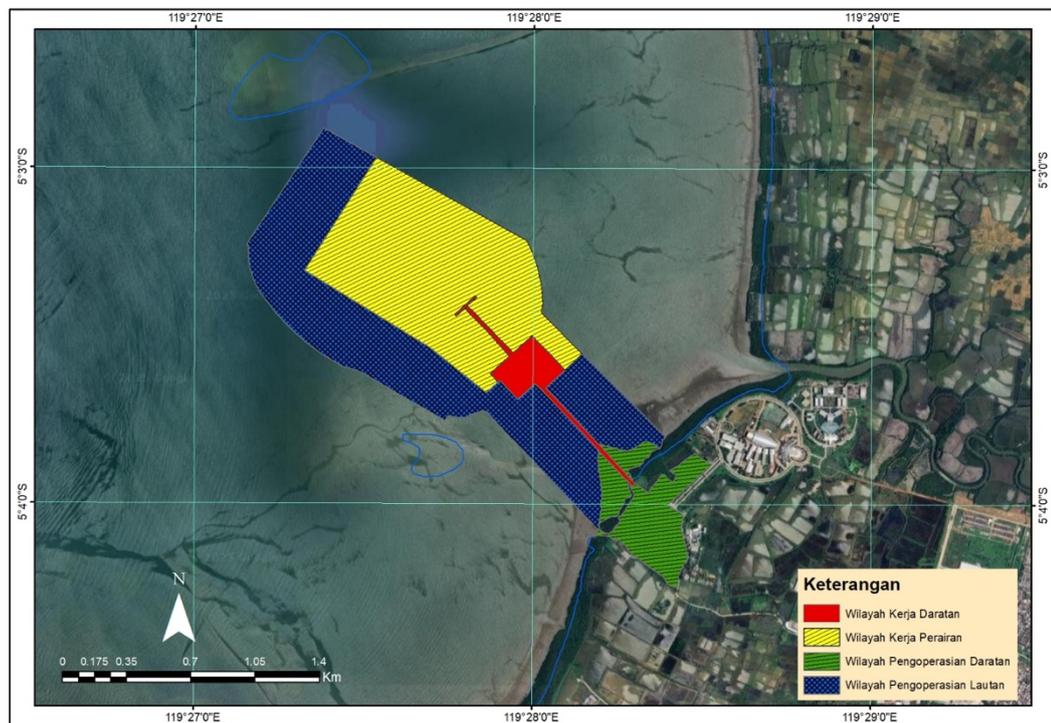
No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Produksi	KG	2.179.939	2.218.307	3.486.855	1.916.455	1.142.343
2	Nilai Produksi	Rp.000	49.460.162	41.525.473	63.764.788	44.755.103	24.871.970
3	Kapal	UNIT	86	449	265	563	363
4	Nelayan	ORG				7.864	4.837
5	Tenaga Kerja	ORG	5933	6713	2215	1.274	1.140
6	Frek. Kunjungan Kapal	KALI	716	635	2168	1.404	538
7	Perusahaan Berbadan Hukum	UNIT	13	15	13	60	60
8	Perusahaan Perorangan	UNIT	6	7	6	0	0
9	Penyaluran Es	KG	2.537.810	5.261.748	6.422.739	5.277.988	3.336.102
10	Penyaluran Air	LTR	1.327.390	3.427.479	2.492.085	3.075.087	1.366.626
11	Penyaluran BBM	LTR	715.187	662.557	1.201.844	582.111	388.798
12	PNBP	Rp	95,956,600	95,956,600	118.455.532	310.023.078	681.530.446
13	Penerbitan SPB	LEMBA R	792	607	988	872	564

Sumber: Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Untia 2019-2023

3. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia.

Wilayah pelabuhan perikanan adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan meliputi wilayah daratan yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, pelelangan, pengepakan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan serta fasilitas umum lainnya di kawasan pelabuhan perikanan. Wilayah Kerja Perairan Wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan meliputi batas wilayah perairan yang dipergunakan untuk kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan di pelabuhan,

tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, perbaikan kapal perikanan dan lain-lain. Wilayah Pengoperasian Daratan pelabuhan perikanan meliputi daratan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pengoperasian pelabuhan perikanan, antara lain akses jalan menuju pelabuhan perikanan dan kawasan pemukiman nelayan. Wilayah Pengoperasian Perairan Wilayah pengoperasian bagian perairan pelabuhan perikanan meliputi perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pelabuhan perikanan, antara lain alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal dan penempatan kapal mati. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya maka Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Untia di delineasi seperti pada gambar di bawah.



Gambar 3. Delineasi WKOPP Pelabuhan Untia

Penetapan delineasi wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan Untia secara keseluruhan adalah yang 232,33 Ha yang terdiri dari:

- a. Wilayah Kerja Daratan seluas : 9,8 Ha
- b. Wilayah Kerja Perairan seluas : 92,84 Ha
- c. Wilayah Pengoperasian Daratan: 23.56 Ha
- d. Wilayah Pengoperasian Perairan: 106,13 Ha

Berdasarkan deliniasi Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Untia yang mencapai total 232,33 Ha, dengan alokasi signifikan pada wilayah pengoperasian perairan (106,13 Ha) dan wilayah kerja perairan (92,84 Ha). Luasnya wilayah perairan yang masuk dalam cakupan operasional pelabuhan menunjukkan potensi besar untuk pengembangan aktivitas maritim yang lebih luas, seperti area tambat labuh yang lebih banyak, perluasan area bongkar muat, atau bahkan pengembangan fasilitas pendukung perikanan di air. Selain itu, dengan deliniasi yang terperinci ini, pengelolaan dan pengawasan terhadap arus lalu lintas kapal, kegiatan pemanduan, dan penempatan kapal dapat dilakukan secara lebih efektif dan terencana, memastikan keselamatan pelayaran dan keberlanjutan operasional pelabuhan perikanan Untia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap posisi pelabuhan Untia Makassar didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi yang berada pada zona perikanan serta melihat kajian kondisi fisik dan operasional pelabuhan Perikanan Untia maka determinasi luas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan Untia secara keseluruhan adalah sebesar 232,33 ha yang terdiri atas wilayah kerja daratan seluas 9,8 ha, wilayah kerja perairan seluas 92,84 ha, wilayah pengoperasian daratan seluas 23,56 ha dan wilayah pengoperasian perairan seluas 106,13 ha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah memberikan dukungan pendanaan dan sponsor dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam kelancaran penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan penerapan dalam bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Untia, Rekan-rekan Dosen Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan atas bantuan teknis, bimbingan, serta masukan yang berharga selama penyusunan penelitian ini. Tidak lupa, terima kasih kepada para reviewer dan editor yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif, sehingga artikel ini dapat disempurnakan dan diterbitkan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan Dana PNBPN Tahun Anggaran 2024 dengan nomor kontrak: 001/PL.22.7.1/SP- PG/2023.

REFERENCES

- Abrahamsz, J. (2009). Analisis Kebijakan Pembangunan Perikanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pendekatan Model EXTAND. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Ambon. 45 hal.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta
- Kohar, A.M. (2011). Analisis Program dan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. FPIK. Universitas Diponegoro. Semarang. 10 hal.
- Kramadibrata, S. (1985). *Perencanaan Pelabuhan*. Penerbit: Ganeac Exact. Bandung.
- Lubis, E. (2000). *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lubis, E. (2001). *Sistem Pelabuhan Perikanan di Laut Cina Selatan*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Volume 10, nomor 1.
- Murdiyanto, Bambang (2002). *Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal Pelabuhan Perikanan*. Bogor. Pelabuhan Perikanan Untia, 2020. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Untia 2019-2023. Makassar
- Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 22 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041. Makassar
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.